

**STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS *GREEN*
PURCHASING DALAM MEWUJUDKAN OPERASIONAL RAMAH
LINGKUNGAN**

I Putu Ekapratama Rangga Sudana¹, dan I Putu Dony Indrayana²

Program Studi Kewirausahaan, STISIP Margarana Tabanan

ekapratamarangga29@gmail.com dan donyindrayanaskom.mm@gmail.com

ABSTRAK – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengadaan barang dan jasa berbasis green purchasing dalam rangka mendukung operasional ramah lingkungan pada sektor pendidikan tinggi. Studi dilakukan pada salah satu perguruan tinggi negeri di Bali dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik green procurement masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara kelembagaan. Hambatan utama teridentifikasi pada aspek kebijakan internal yang belum mendukung, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya akses terhadap produk dan penyedia yang ramah lingkungan. Meskipun demikian, terdapat beberapa inisiatif awal seperti penggunaan produk bersertifikasi lingkungan dan digitalisasi dokumen administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan reformasi kebijakan, pelatihan SDM, serta kemitraan strategis dengan penyedia ramah lingkungan untuk mewujudkan sistem pengadaan yang berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pengadaan publik yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata kunci: *green purchasing*, pengadaan berkelanjutan, perguruan tinggi, pengadaan barang dan jasa, lingkungan

ABSTRACT – *This study aims to examine green purchasing strategies in goods and services procurement to support environmentally sustainable operations within the higher education sector. The research was conducted at a public university in Bali using a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that the implementation of green procurement practices remains fragmented and has yet to be institutionally integrated. Key challenges include the absence of formal internal policies, limited human resource capacity in sustainable procurement, and insufficient access to environmentally certified products and vendors. Nonetheless, several initial initiatives have been identified, such as the use of eco-labeled products and digital document processing. The study concludes that institutional policy*

reform, capacity building, and strategic partnerships with environmentally responsible suppliers are essential to establishing a sustainable procurement system. The implications of this research are expected to contribute to strengthening public procurement governance that supports the goals of sustainable development (SDGs).

Keywords: *green purchasing, sustainable procurement, higher education, goods and services procurement, environment*

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi semakin mendesak dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai laporan internasional seperti *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2021) menunjukkan bahwa peningkatan suhu global, polusi, dan kerusakan lingkungan merupakan akibat langsung dari aktivitas manusia, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks tersebut, munculnya konsep green purchasing menjadi salah satu solusi strategis untuk mendorong perubahan perilaku organisasi dalam proses pengadaan yang berkelanjutan. Green purchasing merupakan bagian dari kebijakan pengadaan berwawasan lingkungan (*green procurement*), yang tidak hanya mempertimbangkan aspek harga dan kualitas, tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan dari produk atau jasa yang dibeli, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan akhir (Walker & Brammer, 2009; Testa et al., 2012). Strategi ini berkontribusi pada upaya mitigasi krisis iklim dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Dalam

implementasinya, green purchasing dapat mengurangi konsumsi energi dan air, menurunkan emisi karbon, serta mengurangi limbah dan polusi berbahaya.

Di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi kebijakan pengadaan yang mendukung prinsip berkelanjutan, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah mendorong pengadaan yang ramah lingkungan untuk menciptakan nilai manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis. Namun, implementasi green purchasing di sektor pemerintahan belum berjalan optimal. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai hambatan masih dihadapi, antara lain: belum adanya integrasi kebijakan hijau dalam dokumen perencanaan dan pengadaan, rendahnya pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan ketersediaan produk ramah lingkungan di pasar lokal, serta lemahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan (Setyowati & Hadi, 2020; Prabowo & Herlambang, 2022). Kondisi tersebut juga tercermin di lingkungan perguruan tinggi negeri, termasuk di

Provinsi Bali. Meskipun memiliki potensi besar sebagai institusi yang mendidik generasi muda dan mengembangkan penelitian berbasis keberlanjutan, praktik pengadaan barang dan jasa di banyak perguruan tinggi belum sepenuhnya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam prosesnya.

Beberapa di antaranya masih mendasarkan keputusan pembelian pada efisiensi biaya, tanpa memperhatikan siklus hidup produk atau dampak ekologis jangka panjang. Padahal, keberadaan kampus di daerah seperti Bali yang sangat menekankan keseimbangan antara manusia dan alam, seharusnya menjadikan institusi ini sebagai pionir dalam operasional yang ramah lingkungan. Melalui pengamatan terhadap dinamika tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana strategi pengadaan barang dan jasa yang mengedepankan prinsip green purchasing diterapkan di lingkungan perguruan tinggi negeri di Bali. Penelitian ini juga berusaha memahami kondisi aktual di lapangan, termasuk bentuk kebijakan, pola pelaksanaan, serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang tidak hanya efisien

dan transparan, tetapi juga berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi pengadaan barang dan jasa berbasis green purchasing dalam mendukung operasional yang ramah lingkungan. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan sifat fenomena sosial-organisasional yang kompleks dan kontekstual, serta membutuhkan interaksi langsung dengan pelaku di lapangan dan analisis naratif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Creswell & Poth, 2018). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan realitas tanpa manipulasi variabel, dengan fokus pada proses pelaksanaan pengadaan ramah lingkungan, faktor pendukung, dan tantangan dari sudut pandang pelaksana dan pemangku kepentingan. Penelitian dilakukan di sebuah perguruan tinggi negeri di Bali yang dipilih secara purposif karena telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perguruan tinggi sebagai institusi publik berperan penting dalam menanamkan nilai keberlanjutan baik pada civitas akademika maupun tata kelola institusional (Lozano, 2011; Testa et al., 2022). Fokus penelitian meliputi kebijakan, mekanisme pelaksanaan,

pemilihan vendor, hingga evaluasi dampak lingkungan dalam pengadaan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengadaan, dengan jumlah ditentukan melalui prinsip data saturation (Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan tematik bertahap, mulai dari reduksi data, pengelompokan tema, hingga penarikan kesimpulan, dengan pendekatan induktif dan kontekstual. Validitas hasil diperkuat dengan triangulasi data antar sumber dan teknik serta pengecekan ulang kepada informan (member checking) (Nowell et al., 2017). Pengadaan berbasis green purchasing merupakan strategi penting dalam mendorong keberlanjutan organisasi, sejalan dengan tuntutan global untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya (Zhu et al., 2023). Studi terbaru menekankan perlunya integrasi prinsip circular economy dan digitalisasi dalam pengadaan hijau untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Kumar & Rahman, 2021; Bocken et al., 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi dan praktik pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan di institusi perguruan tinggi, yang dapat menjadi referensi bagi organisasi lain dalam

mengimplementasikan green purchasing secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Data Responden

Penelitian ini melibatkan 10 responden yang dipilih secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam proses pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi. Responden terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK), staf bagian pengadaan dan perencanaan, serta perwakilan vendor yang menyediakan barang dan jasa ramah lingkungan. Para responden ini memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma (D3) dan pengalaman kerja rata-rata lebih dari tiga tahun dalam bidang pengadaan dan manajemen logistik. Dari segi demografis, usia responden berkisar antara 30 hingga 50 tahun dengan proporsi laki-laki sebanyak 60% dan perempuan 40%. Komposisi tersebut dianggap representatif untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif terkait implementasi strategi pengadaan berbasis green purchasing di lingkungan perguruan tinggi. Data ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengadaan ramah lingkungan di institusi tersebut.

b. Hasil Uji Instrumen

Dalam penelitian ini, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen wawancara yang digunakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertanyaan yang disusun benar-

benar mencerminkan konstruk penelitian yang diteliti serta dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Uji validitas dilakukan melalui dua pendekatan, yakni validitas isi (content validity) dan validitas konstruk (construct validity). Validitas isi diperoleh melalui penilaian ahli yang terdiri dari tiga orang pakar di bidang pengadaan dan keberlanjutan lingkungan. Para ahli menilai relevansi, kelengkapan, dan kejelasan indikator pertanyaan yang dirancang. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh indikator dinyatakan relevan, meskipun terdapat beberapa saran penyempurnaan redaksional pada pertanyaan tertentu yang kemudian diakomodasi dalam revisi instrumen.

Selanjutnya, uji validitas konstruk dilakukan dengan mengujicobakan instrumen kepada tiga orang informan yang memiliki karakteristik serupa dengan responden utama. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam panduan wawancara dapat dipahami secara konsisten oleh responden. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sebagian besar pertanyaan telah dipahami dengan baik, namun terdapat satu pertanyaan yang dinilai ambigu dan kemudian diperbaiki untuk meningkatkan kejelasan maknanya. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan dengan metode test-retest dalam skala terbatas pada tahap uji coba. Tiga informan diminta memberikan jawaban terhadap instrumen yang sama dalam dua waktu

berbeda dengan jeda waktu selama satu minggu.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat konsistensi jawaban yang tinggi antar dua waktu tersebut. Koefisien korelasi antar hasil test-retest mencapai angka 0,82 yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi dan memenuhi standar akademik (Nunnally, 1978). Selain uji statistik, reliabilitas juga diperkuat dengan penggunaan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik selama pengumpulan data utama. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi informasi dari berbagai narasumber serta dari berbagai metode pengumpulan, seperti wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan demikian, instrumen dinyatakan valid dan reliabel serta layak digunakan untuk menggali data terkait strategi pengadaan barang dan jasa berbasis green purchasing di perguruan tinggi.

c. Hasil Analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengadaan barang dan jasa berbasis green purchasing di perguruan tinggi yang menjadi lokasi studi masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam sistem pengadaan secara menyeluruh. Meskipun terdapat kesadaran awal dari para pelaksana pengadaan akan pentingnya prinsip keberlanjutan lingkungan, hal ini belum diikuti dengan penyusunan regulasi internal yang mengatur praktik *green procurement* secara formal. Dokumen kebijakan

pengadaan yang ada masih berorientasi pada prinsip efisiensi biaya, di mana pendekatan *lowest cost* menjadi prioritas utama dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dari unit pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta bagian umum dan perlengkapan, ditemukan bahwa sebagian besar keputusan pengadaan masih mempertimbangkan aspek harga dan ketersediaan, bukan aspek ramah lingkungan. Kondisi ini sejalan dengan temuan dari Wagner & Llerena (2022), yang menyatakan bahwa dalam sektor publik, keterbatasan pedoman operasional dan insentif regulatif menjadi penghambat utama dalam mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam proses pengadaan.

Secara umum, terdapat tiga hambatan utama dalam penerapan strategi pengadaan hijau di perguruan tinggi. Pertama, dari sisi kebijakan kelembagaan, belum tersedia peraturan rektor atau pedoman turunan yang mewajibkan pelaksanaan *green procurement*. Hal ini menyebabkan pelaku pengadaan masih bekerja dalam kerangka prosedur umum yang belum ramah lingkungan. Kedua, aspek sumber daya manusia, di mana sebagian besar pelaksana pengadaan belum mendapatkan pelatihan teknis terkait pengadaan berkelanjutan. Hal ini memperkuat pernyataan Silva & Matos (2021) bahwa keberhasilan *green purchasing* di institusi publik sangat dipengaruhi oleh tingkat

pemahaman dan keterampilan personel pengadaan terhadap prinsip keberlanjutan. Ketiga, dari sisi ketersediaan produk hijau, ditemukan bahwa akses terhadap informasi vendor ramah lingkungan masih terbatas, baik dalam e-katalog LKPP maupun melalui jaringan pemasok lokal. Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa inisiatif positif yang menunjukkan adanya upaya menuju praktik pengadaan berkelanjutan. Beberapa unit kerja telah memprioritaskan pembelian produk yang memiliki sertifikasi lingkungan, seperti alat tulis berbahan daur ulang dan peralatan elektronik hemat energi. Selain itu, telah dilakukan digitalisasi dokumen administratif di beberapa fakultas guna mengurangi konsumsi kertas. Praktik ini sejalan dengan studi oleh Testa et al. (2020) yang menekankan pentingnya transformasi perilaku organisasi melalui perubahan kecil yang berkelanjutan (*incremental sustainable actions*) dalam proses pengadaan sektor publik.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun implementasi *green purchasing* di lingkungan perguruan tinggi masih terbatas, terdapat peluang yang dapat dikembangkan melalui reformasi kebijakan internal, peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta kolaborasi dengan penyedia barang dan jasa yang menerapkan prinsip lingkungan. Strategi ini perlu didukung oleh integrasi indikator hijau dalam sistem evaluasi pengadaan dan

monitoring kinerja vendor, sebagaimana dianjurkan dalam pedoman *Green Public Procurement* dari *European Commission* (2021), yang menekankan pentingnya pengukuran dampak lingkungan sebagai bagian dari siklus pengadaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan sistemik dalam membangun pengadaan berbasis lingkungan di institusi pendidikan tinggi, di mana strategi kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan dukungan teknologi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan operasional perguruan tinggi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan empiris yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi pengadaan barang dan jasa berbasis green purchasing pada perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian masih bersifat inkremental dan belum terlembagakan secara sistemik. Meskipun terdapat kesadaran dari sebagian pelaku pengadaan terhadap urgensi integrasi aspek keberlanjutan dalam proses pengadaan, belum terdapat regulasi institusional yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan pengadaan ramah lingkungan. Sistem pengadaan yang ada masih didominasi oleh pendekatan efisiensi biaya, sehingga kriteria lingkungan belum menjadi komponen evaluatif yang substansial. Kendala utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini

meliputi keterbatasan regulasi internal, rendahnya kapasitas dan literasi sumber daya manusia dalam pengadaan berkelanjutan, serta terbatasnya akses terhadap produk dan penyedia jasa yang memenuhi standar lingkungan. Kendala-kendala ini mengkonfirmasi temuan dalam berbagai studi sebelumnya (Silva & Matos, 2021; Wagner & Llerena, 2022), yang menyebutkan bahwa keberhasilan green procurement sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan kelembagaan, pelatihan teknis, serta infrastruktur pengadaan yang adaptif terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Di sisi lain, terdapat indikasi awal terjadinya pergeseran praktik ke arah pengadaan berkelanjutan, seperti inisiatif pembelian barang bersertifikasi lingkungan, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta digitalisasi dokumen. Inisiatif ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem pengadaan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, namun juga bertanggung jawab secara ekologis.

Sebagai implikasi praktis dari temuan penelitian ini, perguruan tinggi disarankan untuk menerapkan sejumlah langkah strategis guna memperkuat implementasi green purchasing. Strategi pertama adalah formulasi kebijakan institusional yang secara tegas mengatur pengadaan berbasis prinsip keberlanjutan lingkungan, melalui penerbitan regulasi formal seperti Peraturan Rektor atau pedoman teknis operasional. Di samping itu,

peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi aspek krusial, yang dapat diwujudkan melalui program pelatihan teknis dan aplikatif bagi para pelaksana pengadaan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip green procurement serta meningkatkan kemampuan dalam menyusun spesifikasi teknis dan melakukan evaluasi terhadap vendor dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Strategi lanjutan mencakup integrasi indikator hijau dalam sistem pengadaan, baik dalam sistem e-purchasing maupun pada instrumen evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa. Hal ini memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap kontribusi keberlanjutan dalam proses pengadaan. Selain itu, pengembangan kemitraan strategis dengan vendor yang memiliki sertifikasi lingkungan perlu dilakukan untuk memperluas ketersediaan produk ramah lingkungan sekaligus mendorong industri agar lebih adaptif terhadap permintaan pasar hijau. Terakhir, sistem monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dibangun sebagai instrumen pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based), guna menilai efektivitas pelaksanaan strategi serta mengidentifikasi hambatan dan perbaikan yang diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi konsumen yang sadar lingkungan, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perubahan menuju tata kelola

pengadaan publik yang lebih berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak perguruan tinggi yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan pembimbing yang telah memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik pengadaan barang dan jasa yang lebih berkelanjutan di lingkungan pendidikan tinggi.

Daftar Pustaka

- European Commission. (2021). *Buying green! A handbook on green public procurement* (3rd ed.). Publications Office of the European Union.
<https://doi.org/10.2779/39726>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). *Panduan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan*. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
<https://ppkl.menlhk.go.id>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rencana aksi nasional pengadaan berkelanjutan 2021–*

2030.
<https://www.bappenas.go.id>
- Kähkönen, A. K., & Lintukangas, K. (2012). The underlying potential of supply management in sustainable supply chain management. *Supply Chain Management: An International Journal*, 17(6), 529–542.
<https://doi.org/10.1108/13598541211269265>
- Preuss, L. (2009). Addressing sustainable development through public procurement: The case of local government. *Supply Chain Management: An International Journal*, 14(3), 213–223.
<https://doi.org/10.1108/13598540910954557>
- Putri, N. L. P. A. A., & Yasa, I. N. A. (2022). Strategi implementasi pengadaan hijau di sektor publik: Studi kasus pada pemerintah daerah di Bali. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 55–67.
<https://doi.org/10.24843/jian.2022.v12.i01.p05>
- Silva, M. E., & Matos, F. (2021). Training and awareness as drivers of sustainable public procurement practices. *Sustainability*, 13(15), 8202.
<https://doi.org/10.3390/su13158202>
- Testa, F., Annunziata, E., Iraldo, F., & Frey, M. (2020). Drawbacks and opportunities of green public procurement: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 112, 1893–1905.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007>
- Uyarra, E., & Flanagan, K. (2010). Understanding the innovation impacts of public procurement. *European Planning Studies*, 18(1), 123–143.
<https://doi.org/10.1080/09654310903343567>
- Wagner, M., & Llerena, D. (2022). Green procurement in public institutions: Barriers and opportunities. *Journal of Cleaner Production*, 346, 131119.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131119>